

Rekonstruksi Misi Gereja di Indonesia dari Perspektif Pancasila sebagai Religiositas Sipil Indonesia

I Made Priana

depriabali@yahoo.co.id

Abstract

This paper tries to seek the answer towards the question how the church of Indonesia should do her mission in the light of Pancasila which is the Indonesian's religiosity. In seeking the answer of this question, it is found that the essence and the aim of the church mission, as a matter of fact, it is in correlation with the religiosity of Indonesian people. In view of this, it is concluded that doing mission in the perspective of Pancasila, the church of Indonesia might not to practice the mission paradigm which was done by the Western Church in the past. On the contrary, the church of Indonesia together with all her fellow countryman, might to reconstruct her mission in accordance with, the Indonesian religiosity by reviving and rejuvenating the values of Pancasila for the sake of the well-being of Indonesia.

Keywords: Gereja, misi, Pancasila, hati nurani masyarakat, religiositas sipil, Indonesia, rekonstruksi, revitalisasi

Pendahuluan

Kata *gereja* menunjuk kepada suatu persekutuan orang yang dipanggil untuk menjadi milik Yesus Kristus, yakni mengambil bagian pada kepribadian, hidup dan tugas Yesus Kristus (Roma 1:6-7, 1 Korintus 1:2). Sebagai milik Kristus Yesus, gereja dipanggil dan dihimpun bukan hanya untuk mendengarkan sabda dan merayakan sakramen di dalam komunitasnya sendiri (Kisah Para Rasul 2:42), tetapi juga untuk diutus mengaktualisasikan misi Yesus Kristus (Yohanes 20:21). Berpartisipasi dalam misi Yesus adalah suatu dimensi yang koeksistensif dalam hakikat gereja, dan juga merupakan unsur konstitutif dalam diri gereja. Itu dikatakan demikian, karena permulaan eksistensi gereja didasarkan pada misi Yesus dan perjalanan gereja selanjutnya didahului oleh penugasan untuk meneruskan misi Yesus.¹ Misi gereja yang demikian ini, pada hakikatnya adalah misi yang sama bahkan juga misi yang nampaknya tidak akan pernah berubah, bagi gereja di seluruh dunia dan di

¹ Edmund Woga, CSsR, *Dasar-Dasar Misiologi*, Cetakan Kelima (Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 2006), hlm. 13,189-192, 201-202.

sepanjang masa, tetapi pemahaman dan pelaksanaan dari masing-masing gereja terhadap misi tersebut, memang tidak selalu sama di seluruh tempat dan di sepanjang waktu. Bahwa misi gereja di seluruh dunia sama dan tidak akan pernah berubah, adalah karena misi yang diwariskan dan dipercayakan Kristus bagi gereja di seluruh dunia, adalah satu saja, yaitu melanjutkan misi Kristus yang adalah juga misi Allah. Bahwa pemahaman dan pelaksanaan misi dari gereja tertentu pada tempat dan dalam kurun waktu tertentu selalu berbeda, adalah karena pemahaman masing-masing gereja tentang esensi misi Allah itu, memiliki dimensi kesejarahannya. *Artinya, pemahaman gereja tentang misinya itu adalah sebuah produk interaksi antara panggilan untuk setia kepada Tuhannya dan realitas sosial, politik, ekonomi, keagamaan dan budaya, yang ada dalam sebuah masyarakat yang di dalamnya gereja-gereja itu ada.*²

Realitas sosial masyarakat Eropa pada abad ke-15 sampai dengan awal abad ke-20, yaitu pada masa-masa gereja-gereja Barat memformulasikan dan melaksanakan misinya, dapat digambarkan sebagai berikut: *Pertama*, masyarakat Barat tidak beragam keagamaannya. Mereka semua penganut agama kristen. *Kedua*, semua kerajaan-kerajaan yang ada di Eropa, seperti kerajaan Portugis, Spanyol, Belanda, Jerman dan Inggris sama-sama memiliki agenda untuk menemukan daerah-daerah baru di luar Eropa, seperti di wilayah Asia, Afrika dan Amerika untuk dikuasainya secara politik, ekonomi dan kebudayaan.³ Dilakukannya penaklukan kebudayaan penduduk di daerah-daerah yang telah ditemukan dan yang telah dikuasainya secara politis dan ekonomi dengan kebudayaan Eropa, karena bangsa Eropa mengidentikkan kekristenan yang diyakininya sebagai satu-satunya agama yang benar itu, dengan kebudayaan Eropa.⁴ *Ketiga*, masih dalam kisaran waktu dari abad ke-15 sampai dengan awal abad ke-20 ini pula, *pietisme* yang sangat menekankan pertobatan pribadi dan keselamatan jiwa, menjadi gerakan sebagian besar gereja-gereja Eropa dan

² John A. Titaley, "Pembangunan dan Pengembangan Umat Kristen di Indonesia, Suatu Refleksi Kontekstual", Paper seminar disampaikan dalam *Ramadhan di Kampus Universitas Islam Sultan Agung*, (Semarang: 3 Pebruari 1996), hlm. 1-3. John A. Titaley, "Kata Sambutan", dalam John Campbell-Nelson (ed.), *Mengupayakan Misi Gereja Yang Kontekstual, Studi Institut Misiologi Persetia 1992* (Jakarta: Persetia, 1995), hlm.iv-v.

³ Ibid.1, hlm. 48-49.

⁴Victor I Tanja, "Perjumpaan Gereja Dengan Agama-Agama Lain", dalam Chris Hartono (ed.), *Perjumpaan Gereja di Indonesia Dengan Dunianya Yang Sedang Berubah* (Jakarta: Persetia, 1995), hlm. 17.

Amerika Utara.⁵ Bertolak dari kesejarahan masyarakat Eropa seperti termaksud di atas, gereja-gereja Barat pada periode abad ke-15 sampai dengan awal abad ke-20, mendefinisikan dan melaksanakan misinya sebagai pekerjaan gereja yang hanya bisa dikerjakan oleh para misionaris dari Eropa dan Amerika, berupa pergi ke daerah-daerah luar Eropa seperti ke Asia, Afrika dan Amerika Latin yang dikategorikannya sebagai daerah-daerah kafir, dengan dukungan moral dan finansial dari warga gereja Eropa dan Amerika, demi keselamatan jiwa orang-orang yang belum kristen, demi pertumbuhan gereja di daerah-daerah ladang misi,⁶ dan demi terciptanya civilisasi Barat (Westernisasi) pada penduduk di daerah misi,⁷ yaitu tertransplantasinya cara hidup Barat pada cara hidup komunitas kristen yang terbentuk di wilayah koloni.⁸ Pemahaman dan cara misi yang demikian ini, yang dijalankan oleh gereja-gereja Barat di Indonesia dalam kurun waktu lima abad dari tahun 1511 sampai dengan tahun 1942,⁹ tidak hanya membuat gereja telah hadir di kepulauan Indonesia sejak tahun 1543,¹⁰ tetapi juga telah mengakibatkan gereja-gereja di Indonesia bercorak Barat. Fakta bahwa gereja-gereja di Indonesia bernuansa Barat, terindikasi dari bentuk gedung gerejanya, struktur organisasi gerejanya, kegiatan-kegiatan gerejanya dan ajaran-ajaran gerejanya.

Realita bahwa beberapa keberadaan gereja-gereja di Indonesia berciri Barat, nampaknya tidak merupakan masalah. Hal itu dikatakan demikian, karena senyatanya kehadiran gereja-gereja di Indonesia, memang tidak dapat dipisahkan dari pekerjaan misi yang dilakukan oleh gereja-gereja Barat. Namun, persoalan besar akan terjadi, bila gereja-gereja di Indonesia mengambil alih begitu saja, pemahaman dan cara misi gereja-gereja Barat menjadi pemahaman dan cara misi

⁵ Christian de Jonge dan Jan Aritonang, *Apa dan Bagaimana Gereja? Pengantar Sejarah Eklesiologi*, Cetakan Kedua (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 1993), hlm. 48. Bandingkan juga, Chris Hartono, *Pietisme di Eropa dan Pengaruhnya di Indonesia* (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 1974), hlm. 56.

⁶ Peter C. Phan, *In Our Own Tongues, Perspective from Asia on Mission and Inculturation* (Maryknoll, New York: ORBIS BOOKS, 2003), hlm. 32.

⁷ Choan Seng Song, *Christian mission in Reconstruction an Asian Analysis* (Maryknoll, New York: ORBIS BOOKS, 1977), hlm. 2.

⁸ Aloysius Pieris, "Toward an Asian Theology of Liberation: Some Religion-Culture Guidelines," *Dialogue, New Series VI* (Colombo: Ecumenical Institute for Study and Dialogue, 1979), hlm. 36. Lihat juga, E.G. Singgih, *Dari Israel ke Asia* (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 1983), hlm. 22.

⁹ Bandingkan F. Ukur dan Cooley, *Jerih dan Juang, Laporan Nasional Survey Menyeluruh Gereja di Indonesia* (Jakarta: Lembaga Penelitian dan Studi DGI, 1979), hlm. 450.

¹⁰ Dick Hartoko S.Y., "Perjumpaan Gereja Dengan Budaya," dalam Chris Hartono (ed.), *Perjumpaan Gereja di Indonesia Dengan Duniannya Yang Sedang Berubah* (Jakarta: Persetia, 1995), hlm. 159.

gereja-gereja di Indonesia, dengan mengabaikan realitas kesejarahan dari pemahaman dan cara misi gereja-gereja Barat, dan juga dengan tanpa mengkaitkan pemahaman dan cara misi gereja-gereja di Indonesia dengan realitas kesejarahan Indonesia. Kesejarahan masyarakat Barat di bidang sosial, agama, politik, ekonomi, dan budaya sangat berbeda dengan kesejarahan masyarakat Indonesia. Pemahaman dan cara misi gereja-gereja di Indonesia yang tidak terkait dengan cita-cita dan kesadaran bersama Indonesia, akan membuat gereja-gereja di Indonesia mengalami kesulitan dalam mengemban misi yang dibebankan Tuhan kepadanya di Indonesia. *Sebaliknya, misi dan cara misi gereja di Indonesia yang didefinisikan dari perspektif moralitas Indonesia sebagaimana terkandung dalam Pancasila, akan membantu gereja di Indonesia untuk menjadi semakin cerdas dalam mengaktualisasikan misinya di Indonesia.*¹¹

Bagaimanakah aktualisasi atau rekonstruksi misi gereja di Indonesia dari perspektif Pancasila sebagai religiousitas sipil Indonesia, merupakan pertanyaan yang hendak dijawab dalam paper ini. Dalam rangka menjawab pertanyaan tersebut, paper ini menelusuri dan menguraikan hal-hal sebagai berikut: *Pertama*, Pancasila sebagai hati nurani bersama masyarakat Indonesia. *Kedua*, nilai-nilai dan agenda keindonesiaan dalam religiousitas sipil Pancasila. *Ketiga*, hakikat misi sebagaimana terbaca dari Injil dengan kaca mata keindonesiaan. *Keempat*, aktualisasi atau rekonstruksi misi gereja di Indonesia dalam perspektif Pancasila sebagai religiousitas sipil Indonesia.

1. Pancasila Sebagai Hati Nurani Bersama Masyarakat Indonesia

“Hati nurani bersama masyarakat” adalah ungkapan yang dimunculkan oleh David Emile Durkheim. Ungkapan “hati nurani bersama masyarakat” oleh Durkheim disebutnya juga dengan ungkapan “kesadaran kolektif masyarakat”, “moral umum masyarakat”, “jiwa masyarakat” dan “agama bersama dari masyarakat”. Yang dia maksudkan dengan semua ungkapan ini, adalah kesamaan-kesamaan sosial yang sekaligus merupakan kekuatan sosial yang sangat hakiki. Hal itu terjadi demikian, karena menurut Durkheim hati nurani bersama masyarakat itu, menyerap dan sekaligus menundukkan kepribadian individu pada kepribadian kolektif, sehingga di

¹¹ John A. Titaley, "Pembangunan dan Pengembangan.....," hlm. 2. Lihat juga John A. Titaley, "Kata Sambutan," dalam John. Campbell-Nelson (ed.), *Mengupayakan Misi Gereja Yang Kontekstual Studi Institute Misiologi Persetia 1992* (Jakarta: Persetia, 1995), hlm. iv-v.

dalam hati nurani bersama masyarakat itu, kehendak semua orang bergerak secara spontan dan seperasaan.¹² Hati nurani bersama masyarakat itu, oleh Durkheim dikatakan, memiliki kekuatan yang sangat dahsyat. Ia berfungsi untuk mengintegrasikan sebuah masyarakat.¹³ Lebih jauh Durkheim juga menyebutkan bahwa hati nurani bersama masyarakat itu adalah sangat sakral, karena ia terkait dengan kesejahteraan bersama dari sebuah masyarakat. Hati nurani bersama masyarakat itu, dimata Durkheim, sangat mengagungkan masyarakat. Oleh karena itu, setelah menginvestigasi prinsip totemic pada sistim keyakinan Suku Arunta masyarakat Aborigin di Australia, dia juga menegaskan bahwa tuntutan kesetiaan kepada setiap anggota untuk kepentingan semua anggota masyarakat, harus menjadi tuntutan atau panggilan yang diinternalisasikan pada pemikiran dan kehidupan setiap anggota.¹⁴

Teori Durkheim tentang *hati nurani bersama masyarakat* sebagai kesamaan-kesamaan sosial yang merupakan kekuatan sosial untuk mengintegrasikan sebuah masyarakat, sejalan dengan teori Jean Jacques Rousseau tentang *agama sipil*, yang dikonstruksinya di Eropa pada abad ke-18, berdasar pada teori kontrak sosialnya bahwa kepentingan tertib sosial manusia dan kewajiban moral pada semua orang berada pada sisi yang sama.¹⁵ Teori Durkheim dan Rousseau tentang "hati nurani masyarakat" atau "agama sipil" seperti termaksud di atas, ada juga dalam konsepsi Rober N. Bellah. Dalam konsepsi Bellah "hati nurani masyarakat" atau "agama sipil" didefinisikan sebagai tuntunan dan tuntutan sosial yang memiliki nilai imaniah yang patut dilakukan oleh setiap warga masyarakat demi kepentingan

¹² Emile Durkheim, *The Division of Labor in Society* (New York: The Free Press, 1984), hlm.26. Lihat juga, Agus Bustanuddin, *Agama dan Fenomena Sosial, Buku Ajar Sosiologi Agama* (Jakarta: Universitas Indonesia, 2010), hlm. 68. K.J. Veeger, *Realitas Sosial: Refleksi Filsafat Sosial atas Hubungan Individu-Masyarakat dalam Cakrawala Sejarah Sosial* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 1993), hlm. 140,171. Doyle P. Johnson, *Sociological Theory: Classical Founders and Contemporary Perspective*, diindonesiakan oleh Robert M. Z. Lawang, *Teori Sosiologi Klasik dan Modern* (Jakarta: PT Gramedia, 1986), hlm. 168. Tom Campbell, *Tujuh Teori Sosial: Sketsa, Penilaian, Perbandingan* (Yogyakarta: Kanisius, 1994), hlm.168. Djuretna A. Imam Muhni, *Moral Religi Menurut Emile Durkheim & Henri Bergson* (Yogyakarta: Kanisius, 1994), hlm. 40-42.

¹³ Daniel I. Pas, *Eight Theories of Religion*, Second Edition (New York: Oxford University Press, 2006), hlm. 88-90, 218, 238.

¹⁴ Emile Durkheim, *The Elementary Forms of the Religious Life*, Carol Cosman (trans.), (Oxford: University Press, 2001), hlm. xx-xxii, 11, 13, 18, 20, 312-319, 28, 208-209.

¹⁵ Jean Jacques Rousseau, *The Social Contract*, diindonesiakan oleh Sumardjo (Jakarta: Penerbit Erlangga, 1986), hlm. xv,xix, 14-15, 17-29. Bandingkan juga dengan, Robert N. Bellah & Philip E. Hammond, *Varietas of Civil Religion*, diindonesiakan oleh Imam Khoiri, Fathurrahman, Sirojuddin Arif, Jazilus Saho'M (Yogyakarta: IRCiSoD, 2003), hlm. 35, 293-296.

bersama.¹⁶ Masih senada dengan konsepsi “hati nurani masyarakat” yang dalam bahasa Bellah diungkapkan sebagai tuntutan dan tuntutan sosial, yang memiliki nilai imaniah sehingga patut dilakukan oleh setiap warga masyarakat demi kepentingan bersama, Hans Kung juga memiliki gagasan tentang “etik global”. Etik global dalam pemikiran Hans Kung adalah sebuah konsensus dasar dari sebuah masyarakat, yang terkait dengan nilai-nilai yang mengikat dan standar-standar yang tidak dapat diganggu gugat oleh anggota masyarakat, demi terhindarnya masyarakat dari kekacauan dan kediktatoran.¹⁷

Lebih jauh Hans Kung mengemukakan bahwa “etik global” itu, yang dalam bahasa Durkheim disebut “moral masyarakat”, atau “hati nurani masyarakat”, bukanlah sebuah kesatuan agama di atas semua agama yang ada, dan juga bukan dominasi satu agama atas agama lainnya. Etik global juga bukan mereduksi agama-agama ke dalam minimalisme etis, melainkan menghadirkan empat batas minimal etik yang patut dimiliki bersama oleh semua agama. Keempat batas minimal etik yang patut dimiliki bersama oleh semua agama, karena keempat nilai itu sesungguhnya terdapat pada hampir semua agama ialah sebagai berikut: Pertama, nilai non kekerasan dan hormat pada kehidupan. Kedua, nilai solidaritas dan tata ekonomi yang adil. Ketiga, nilai toleransi dan hidup yang tulus. Keempat, nilai kesejajaran hak dan kerjasama antara laki-laki dan perempuan. Menurut Hans Kung, etik global tidak dimaksudkan untuk melawan siapapun, namun justru untuk mengundang setiap orang untuk menjadikan etik global sebagai milik bersama dan berbuat sesuai dengannya. Dalam hipotesa Hans Kung dikatakan bahwa, bila keempat batas minimal etik yang patut dimiliki bersama oleh semua agama seperti termaksud di atas, menjadi jiwa semua agama, maka masing-masing agama akan memiliki kemampuan untuk mengatasi ajaran, hukum dan institusi agamanya demi kemanusiaan.¹⁸ Bila hipotesa Hans Kung dituangkan dalam bahasa Durkheim, nampaknya bisa dikatakan bahwa, kalau “hati nurani masyarakat” menjadi jiwa masing-masing agama, maka setiap agama dimungkinkan untuk memproyeksikan dogma dan praktek keagamaan yang selaras dengan moral umum masyarakat.

¹⁶ Robert Bellah, *Beyond Belief*, diindonesiakan oleh Rudy Harisyah Alam (Jakarta: Paramadina, 2000), hlm. 246-270.

¹⁷ Hans Kung dan Karl-Josef Kuschel, *A Global Ethic*, diindonesiakan oleh Ahmad Murtajib (Yogyakarta: Sisiphus, 1999), hlm. xxxi-xxxiv, 16, 21-39.

¹⁸ *Ibid*, hlm. 150-156.

Berdasarkan pada teori Durkheim tentang “hati nurani masyarakat” bahwa itu adalah, kesamaan-kesamaan sosial yang menjadi kekuatan sosial sangat hakiki untuk mengintegrasikan masyarakat, memperhatikan teori Rousseau dan konsepsi Bellah tentang “agama sipil” bahwa itu adalah, tuntunan dan tuntutan sosial yang memiliki nilai imaniah yang patut dilakukan oleh setiap warga masyarakat demi kepentingan bersama, mencermati gagasan Hans Kung tentang “etik global” bahwa itu adalah, sebuah konsensus dasar yang terkait dengan nilai-nilai yang mengikat dan standar-sandar yang tidak dapat diganggu gugat, demi terhindarnya masyarakat dari kekacauan dan kediktatoran, menyimak proses terbentuknya Pancasila bahwa ia ditetapkan sebagai konsensus bersama masyarakat Indonesia untuk menuntun dan sekaligus menuntut segenap komponen bangsa dalam menyatukan dan membangun negara Indonesia merdeka, kemudian menyimak kesaksian Soekarno bahwa Pancasila itu bukanlah sebuah ide abstrak dari dia, melainkan merupakan sebuah kepribadian *genuine* manusia Indonesia yang telah lama melekat dalam sanubari dan perilaku mereka,¹⁹ maka dapat disimpulkan bahwa *Pancasila itu adalah hati nurani bersama masyarakat Indonesia atau jiwa bersama dari masyarakat Indonesia atau religiousitas sipil Indonesia.*

2. Nilai-Nilai Dan Agenda Keindonesiaan Dalam Religiousitas Sipil Pancasila

Pancasila yang absah secara yuridis konstitusional, sehingga merupakan konsensus bersama untuk menuntun dan sekaligus menuntut seluruh rakyat Indonesia, dalam rangka menyatukan dan membangun negara Indonesia merdeka, agar menjadi bangsa yang tertib dan teratur dalam perjalanan meraih cita-cita bangsa, yaitu Indonesia mensejahtera, adalah Pancasila yang ditetapkan dalam sidang PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945, yakni Pancasila yang dimuat dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 (UUD'45). Urutan dan rumusan Pancasila termaksud adalah sebagai berikut: Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan Yang Adil dan

¹⁹Proses ditetapkannya Pancasila sebagai konsensus bersama bangsa Indonesia untuk menuntun dan sekaligus menuntut seluruh rakyat Indonesia dalam membangun Indonesia merdeka, dan kesaksian Soekarno bahwa Pancasila itu adalah kepribadian bangsa Indonesia, berlangsung dalam sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) pada tanggal 29 Mei - 1 Juni, 10 Juli - 17 Juli 1945 dan dalam sidang Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) 18 Agustus 1945. Agenda dan dinamika persidangan BPUPKI dan PPKI terekam detail dan rapi dalam Saafroedin Bahar dkk., *Risalah Sidang Badan Penyelidik Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) dan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI)* (Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia, 1995), hlm. 38, 69-76, 81-82, 94-95, 120,177, 266, 351, 415.

Beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan Yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan Dalam Permusyawaratan/Perwakilan, Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia. Nilai-nilai dan agenda keindonesiaan yang terbenam dalam kelima sila itu, terjabar dalam proklamasi kemerdekaan bangsa Indonesia, dalam Pembukaan UUD'45, dan dalam Batang Tubuh UUD'45. Dengan kata lain, semua formula dan konsepsi yang terdapat pada proklamasi kemerdekaan Indonesia, Pembukaan UUD'45 dan Batang Tubuh UUD'45 merefleksikan nilai-nilai dan agenda keindonesiaan.²⁰

2.a. Nilai dan agenda keindonesiaan sebagaimana terjabar dalam teks proklamasi kemerdekaan Indonesia

Proklamasi kemerdekaan Indonesia tersusun dalam kalimat: "Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain, dilaksanakan secara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945. Atas nama bangsa Indonesia Soekarno Hatta." Pernyataan "Kami bangsa Indonesia..." menunjuk kepada manusia Indonesia seluruhnya tanpa terkecuali, apapun suku, ras dan agama mereka, yang dalam realitas keragaman mereka secara bersama-sama mendukung dan menyatakan kemerdekaan Indonesia per-17 Agustus 1945. Dalam hal ini, kemerdekaan Indonesia adalah dari, oleh dan untuk setiap warga negara Indonesia tanpa membedakan suku, ras dan agamanya.²¹ Melalui makna proklamasi kemerdekaan Indonesia yang demikian ini, Indonesia menyaksikan kepada dunia bahwa Indonesia adalah bangsa yang mengagungkan nilai kebersamaan Indonesia. Masyarakat Indonesia mengakui bahwa Indonesia merdeka adalah untuk semua, dan semua adalah untuk Indonesia merdeka. Indonesia adalah bangsa yang beragenda tidak akan memperlakukan sesama bangsanya, dari suku, ras dan agama manapun mereka berasal, sekedar sebagai aksesoris atau penumpang gelap, yang dapat diperlakukan semena-mena. Sebaliknya Indonesia adalah bangsa yang berjanji untuk mengakomodir setiap identitas dan entitas primordial yang ada di negri ini, sebagai bagian integral dari bangsa Indonesia.

²⁰ Kaelan, *Pancasila Yuridis Kenegaraan* (Yogyakarta: Liberty, 1987), hlm. 73. Khusus mengenai kesaksian Soekarno bahwa Pancasila itu adalah kepribadian bangsa Indonesia bisa dilihat dalam: Soekarno, *Di Bawah Bendera Revolusi*, Vol. 1. (Jakarta: Panitia Di Bawah Bendera Revolusi, 1964), hlm. 6-8.

²¹ John A. Titaley, "Panggilan Gereja Dalam Heterogenitas Masyarakat Indonesia", *Makalah* (Salatiga: 19 Juli 1997) hlm. 5.

2.b. Nilai keindonesiaan sebagaimana terjabar dalam Pembukaan UUD'45

Pembukaan UUD'45 terdiri dari empat alinea. Alinea pertama berbunyi, "Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan peri-keadilan". Kalimat pada alinea pertama dari Pembukaan UUD'45 ini, merupakan pandangan Indonesia tentang imperialisme. Bagi Indonesia, imperialisme itu tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan sehingga harus ditentang dan dihapuskan, agar semua bangsa di dunia dapat menjalankan hak kemerdekaannya sebagai hak dasarnya. Dalam pandangan ini, juga terkandung panggilan bahwa setiap hal yang bertentangan dengan perikemanusiaan dan kesederajatan, harus secara sadar ditentang oleh bangsa Indonesia. Perlakukan mereka secara diskriminatif dalam kurun waktu yang sangat lama. Ideologi (cita-cita luhur atau agenda) dan religiositas (moral luhur atau nilai-nilai luhur) Indonesia yang ada pada alinea pertama Pembukaan UUD'45, menunjukkan dengan tegas bahwa, Indonesia adalah bangsa yang menjunjung tinggi nilai kebebasan, perikemanusiaan, kesederajatan, keadilan, dan beragenda untuk bersikap anti terhadap penindasan, karena ia meyakini bahwa kebebasan, perikemanusiaan, dan keadilan itu hanya dapat diwujudkan di bumi ini jika tidak ada penjajahan.²²

Alinea kedua Pembukaan UUD'45 menyatakan, "Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu kemerdekaan Negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur." Kalimat ini mencerminkan: Pertama, adanya ketajaman penglihatan bahwa perjuangan kemerdekaan Indonesia telah sampai pada tingkat yang menentukan. Kedua, adanya pemahaman bahwa momentum berupa kemerdekaan yang telah dicapai tersebut, harus dimanfaatkan untuk menyatakan kemerdekaan. Ketiga, adanya kesadaran bahwa kemerdekaan itu bukan merupakan tujuan akhir, tetapi masih harus diisi dengan mewujudkan negara yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Kesadaran bersama dan cita-cita bangsa Indonesia yang demikian,

²² Soekarno, *Indonesia Menggugat*, (Jakarta: Yayasan Pendidikan Sukarna-Inti Idayu Press, 1983), hlm. 13-61. Bandingkan, John Titalay, *Nilai-Nilai Dasar Yang Terkandung Dalam Pembukaan Undang Undang Dasar 1945*, (Salatiga: Fakultas Teologi UKSW, 1999), hlm. 8. Bandingkan juga, Tim Pusdiklat Pegawai, *Undang Undang Dasar 1945*, (Jakarta: Pusdiklat Pegawai, 2008), hlm.15.

menunjukkan bahwa keindonesiaan adalah sebuah peradaban yang mengagungkan persatuan, kedaulatan bangsa, kemakmuran bersama dan sebuah agenda memposisikan persatuan, kedaulatan bangsa dan kemakmuran seluruh rakyat di atas kepentingan dan kemakmuran individual atau golongan.²³

Rumusan alinea ketiga Pembukaan UUD'45 berbunyi, "Atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan yang luhur, supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya." Yang dimaksud dengan rakyat Indonesia ini, bukanlah rakyat Indonesia yang beragama Islam saja, akan tetapi juga yang beragama Hindu, Budha, Kristen, Kebatinan, Konghucu, Marapu, Kaharingan dan semua agama suku lainnya yang ada di Indonesia. Semua agama Indonesia tersebut mengakui bahwa kemerdekaan itu bukanlah hanya sekedar hak manusia per se, sebab yang asasi itu bisa menjadi hak manusia karena dimungkinkan oleh rahmat Tuhan. Melalui pengakuan yang demikian, seperti diungkap Titaley, Indonesia mau menunjukkan rasa keagamaan dirinya, bahwa teraihnya kemerdekaan yang dalam kenyataannya memang diperjuangkan oleh bangsa Indonesia dengan korban jiwa, tidak terlepas dari adanya campur tangan Tuhan Yang Maha Kuasa. Makna dari pengakuan yang demikian, memperlihatkan bahwa keindonesiaan itu adalah sebuah rasa akan ketuhanan yang menyatu padu dengan rasa kemanusiaan,²⁴ dan sebuah agenda yang mengkarakterisasi atau mengkonstitusi keyakinan akan ketuhanan dalam rasa dan perilaku kemanusiaan,²⁵ sehingga tidak bersifat manipulatif dan juga tidak bernilai nol di mata Tuhan.²⁶

Alinea keempat Pembukaan UUD'45 menyatakan, "Kemudian daripada itu untuk membentuk susunan pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan

²³ John A. Titaley, *Nilai-Nilai Dasar Yang Terkandung Dalam Pembukaan Undang Undang Dasar 1945* (Salatiga: Fakultas Teologi UKSW, 1999), hlm. 8-9.

²⁴ John A. Titaley, *Pembangunan dan Pengembangan Umat Kristen di Indonesia: Suatu Refleksi Kontekstual*, Bahan seminar disampaikan dalam Ramadhan di Kampus Universitas Islam Sultan Agung, tanggal 3 Pebruari 1996 di Semarang, hlm. 7.

²⁵ Thobias A. Messakh, *Konsep Keadilan Dalam Pancasila* (Salatiga: Satya Wacana University Press, 2007), hlm 45-47, 161.

²⁶ Ahmad Syafii Maarif, *Islam Dalam Bingkai Keindonesiaan Dan Kemanusiaan Sebuah Refleksi Sejarah* (Bandung: Penerbit Mizan, 2009), hlm. 27.

sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat....” Bahwa Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik menunjukkan bahwa keindonesiaan adalah sebuah nilai pengagungan akan kepentingan publik, kepentingan bersama yakni kepentingan akan kebangsaan.

2.c. Nilai, karakter dan agenda keindonesiaan sebagaimana terjabar dalam beberapa pasal dari Batang Tubuh UUD’45

Pokok pikiran dalam Pembukaan UUD’45 pada alinea keempat seperti termaksud di atas, diuraikan lebih lanjut dalam pasal 1 ayat 1 UUD’45 yang berbunyi: “Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan yang berbentuk Republik. Bangsa Indonesia memilih bentuk negara yang dinamakan Republik yaitu suatu bentuk pemerintahan yang mengutamakan pencapaian kepentingan umum (*res publica*) dan bukan kepentingan perseorangan atau kepentingan golongan. Dalam negara yang berbentuk republik, tercermin jelas bahwa agenda dan nilai luhur bangsa adalah menjunjung tinggi persatuan Indonesia. Dalam menjunjung tinggi persatuan Indonesia, bangsa Indonesia menghidupi semboyan nasional “Bhinneka Tunggal Ika”. Melalui semboyan ini, Indonesia menggelorakan semangat kesatuan dalam keragaman dan keragaman dalam kesatuan. Dengan mengusung semboyan “Bhinneka Tunggal Ika”, Indonesia berkehendak agar bingkai kesatuan Indonesia yang mengikat keragaman Indonesia tidak akan menciderai keragamannya. Begitu juga sebaliknya keragaman Indonesia yang diikat oleh bingkai kesatuan Indonesia, tidak akan membawa bangsa Indonesia kepada pertikaian, perpecahan dan pemisahan. Bentuk negara yang demikian ini menunjukkan bahwa keindonesiaan adalah sebuah nilai pemuliaan akan nasionalitas yang multikultural dan sebuah agenda untuk mengelola ide nasionalitas dan realitas keragaman Indonesia sebagai proses dialektis dimana dinamika antara nasionalitas dan keragaman Indonesia diharap akan saling menopang dan menguatkan.²⁷

Pokok pikiran tentang negara persatuan juga terjabar dalam pasal 29 ayat 2 UUD’45 yang berbunyi, “Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk

²⁷ Djohan Effendi, *Pluralisme dan Kebebasan Beragama* (Yogyakarta: Institu Dian/Interfidei, Cetakan IV, 2013), hlm.1-3.

memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agama dan kepercayaannya itu." Hukum ini terlahir dari fakta bahwa bangsa Indonesia mengakui intervensi Tuhan merahmati perjuangan bangsa Indonesia yang beragam agama. Pengakuan ini memiliki arti bahwa pemerintah dan rakyat Indonesia meyakini Tuhan merahmati penganut agama apapun yang ada di Indonesia. Menjamin kebebasan beragama, berarti saling mengakui dan saling mengusahakan keharmonisan dalam berinteraksi antar agama. Pada saat menjabarkan sila ketuhanan bagi Indonesia merdeka, Soekarno tidak saja menyebut bahwa masing-masing agama Indonesia bertuhan tuhannya sendiri sendiri, melainkan juga dia mengatakan bahwa negara Indonesia merupakan suatu negara yang bertuhan. Lebih detailnya Soekarno berkata sebagai berikut: "*Hendaknja negara Indonesia ialah negara jang tiap-tiap orangnja dapat menjembah Toehannja dengan tjara jang leloeasa. Segenap rakjat hendaknja ber-Toehan setjara keboedajaan, ja'ni dengan tiada egoisme-agama. Dan hendaknja negara Indonesia satu negara jang bertoehan.*"²⁸ Perkataan Soekarno ini mengandung makna bahwa umat beragama Indonesia dalam alam Indonesia merdeka nanti tidak hanya sekedar menjadi pemeluk-pemeluk suatu agama saja, tetapi lebih dari itu diharapkan menjadi manusia Indonesia yang memiliki peri kehidupan beragama ala Indonesia yakni perilaku beragama yang tidak egois. Makna Pancasila yang dijabarkan dalam UUD'45 pasal 29 ayat 2 menunjukkan bahwa keindonesiaan adalah sebuah nilai pemuliaan akan ketuhanan yang berimplikasi sosial, berupa pengagungan akan kemanusiaan, dan sebuah agenda untuk menerapkan prinsip ketuhanan yang toleran, bukan ketuhanan yang mendominasi, yang saling menyerang, mengucilkan apalagi mentiadakan,²⁹ karena semua agama yang ada di Indonesia mengaku bahwa mereka adalah setara sama-sama sebagai sesama manusia dihadapan Tuhan, bangsa, dan negara.³⁰

Tentang nilai keindonesiaan sebagai sebuah spirit yang mengagungkan kemakmuran bersama seluruh rakyat Indonesia, sebagaimana telah dijabarkan pada alinea kedua dan alinea keempat Pembukaan UUD'45, dijabarkan juga

²⁸ Saafroedin Bahar, dkk., (penyunting), *Risalah Sidang*, hlm. 81.

²⁹ Yudi Latif, *Negara Paripurna, Historisitas, Rasionalitas, dan Aktualitas Pancasila*, Cetakan Keempat (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2012), hlm.19.

³⁰ John A. Titaley, "Pembangunan dan Pengembangan.....," hlm. 8-9. Lihat juga, Yayasan Idayu (pengumpul), *Sekitar Tanggal dan Penggalinya, Guntingan Pers dan Bibliografi tentang Pancasila*, edisi II (Jakarta: 1991), hlm. 198

secara lebih operasional dalam Batang Tubuh UUD'45 pada pasal 31, 33 dan 34. Ketiga pasal UUD'45 ini, mendefinisikan bahwa kesejahteraan bersama bagi seluruh rakyat Indonesia itu, adalah persamaan bagi seluruh rakyat Indonesia yang tidak hanya berupa persamaan politik, tetapi juga berupa persamaan di bidang pendidikan dan ekonomi. Visi kesejahteraan Indonesia yang demikian ini, tidak berbasis individualisme-kapitalisme, juga tidak merupakan sistim etatisme, tetapi berbasis pada jiwa gotong royong.³¹ Dalam prinsip kesejahteraan yang berbasis gotong royong, setiap putra-putri Indonesia berhak mendapat kesempatan sama untuk berpartisipasi, dan juga setiap individu Indonesia tidak dikekang kebebasannya untuk mengembangkan diri dalam bidang ekonomi. Dalam prinsip kesejahteraan Indonesia, seluruh rakyat merupakan susunan masyarakat yang integral, yang anggota-anggotanya saling terkait sehingga membentuk satu kesatuan yang organis. Sistim kesejahteraan Indonesia yang berjiwa gotong royong ini menunjukkan bahwa keindonesiaan itu adalah sebuah nilai yang mengagungkan rasa kekeluargaan.³²

Berdasarkan pada investigasi tentang nilai-nilai, karakter dan agenda keindonesiaan sebagaimana terbenam dalam Pancasila dan sebagaimana terjabar dalam Proklamasi Kemerdekaan, Pembukaan UUD'45 dan Batang Tubuh UUD'45, dapat disimpulkan bahwa, *Indonesia adalah bangsa yang memiliki kesadaran bersama bahwa semua anak bangsa adalah umat kepunyaan Tuhan yang sama-sama diberi hak untuk hidup dalam kemerdekaan dan kesetaraan. Bersumber dari kesadaran bersama ini, Indonesia adalah bangsa yang meyakini bahwa panggilan hidupnya adalah mewujudkan Indonesia sejahtera melalui peradaban yang menjunjung tinggi rasa ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kebersamaan dan keadilan dalam kehidupan beragama, berbangsa dan berekonomi. Kemudian masih bertolak dari kesadaran bersamanya, Indonesia juga adalah bangsa yang memahami bahwa mengingkari hak kemerdekaan anak bangsa, dan memperlakukan mereka secara diskriminatif, tidak secara kekeluargaan adalah sebuah tindakan yang sangat tidak menghormati Tuhan, sangat tidak manusiawi, tidak memancarkan rasa persatuan dan cinta akan*

³¹ Yudi Latif, *Negara Paripurna*....., hlm. 16, 19.

³² I Ketut Seregig, *Filsafat Pancasila dalam Perspektif Hindu*, (Surabaya: Penerbit PARAMITA, 2012), hlm. 211-212.

kebangsaan, sehingga sekaligus juga sebagai tindakan yang sangat menciderai agenda besar bangsa yaitu Indonesia Raya yang mensejahtera.

3. Hakikat Misi Sebagaimana Terbaca Dari Injil Dengan Kaca Mata Keindonesiaan

Mengeksplorasi hakikat misi dalam kitab Injil dari perspektif keindonesiaan, terlihat jelas bahwa misi yang dimaksudkan Yesus untuk diteruskan gereja, adalah misi Allah yang telah dikerjakan oleh Yesus sendiri selama pelayanannya di dunia yaitu memberitakan kerajaan Allah.³³ Sebagai agen Allah untuk memberitakan kerajaan Allah di dunia, maka yang menjadi horizon dari misi gereja bukanlah gereja tetapi dunia. Oleh karena dunia yang menjadi horizon dari misi gereja, maka perutusan gereja kepada dunia, tidak dapat dipikirkan tanpa hubungannya dengan dunia, tanpa keterbukaannya terhadap dunia dan terlebih lagi tanpa pengabdianya kepada dunia.³⁴ Sebagaimana Yesus dalam misi kerajaan Allah, melakukan karya berdampak pada kehidupan dunia, demikianlah juga sepatutnya gereja berbuat³⁵ yakni mengarahkan seluruh ciptaan kepada kepenuhan kedamaian di dalam Allah (Kolose 1:15). Fakta bahwa keberadaan gereja hanya sebagai sarana yang dikehendaki Yesus, untuk menolong umat manusia menuju hidup dalam kerajaan Allah menunjukkan bahwa, hakikat misi gereja ialah memberitakan kerajaan Allah di dunia.³⁶

Terkait dengan makna dari ungkapan "kerajaan Allah", sebagaimana terjabar dalam bukunya "*Jesus and the Reign of God*", dimana Song lebih memilih pemakaian ungkapan "*the reign of God*" (Pemerintahan Allah) dari pada "*the kingdom of God*" (Kerajaan Allah), karena menurut Song istilah "Kerajaan Allah" lebih mengandung arti wilayah nasional, sistem feodal dan struktur monarki atau suatu kultur otoriter, adalah tepat.³⁷ Hal itu dikatakan demikian karena Yesus sendiri sebagaimana tertayang dalam pengajaranNya kepada para pengikutNya untuk berdoa, "agar kerajaan Allah datang, dan kehendak Allah jadi di bumi seperti di sorga" (Matius 6:10), menghayati bahwa makna kerajaan Allah bukan

³³ J. Herbert Kane, *Understanding Christian Missions*, Fourth Edition (Grand Rapids: Baker Book House, 1990), hlm. 27.

³⁴ Edmund Woga, CSsR, *Dasa-Dasar Misiologi*, Cetakan Kelima (Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 2006), hlm. 113, 127.

³⁵ D. J. Bosch, *Transforming Mission, Paradigm Shifts in Theology of Mission* (Maryknoll New York: Orbis Books, 1991), hlm. 504.

³⁶ Edmund Woga, CSsR, *Dasar-Dasar Misiologi*,... hlm. 189-192.

³⁷ Choan Seng Song, *Jesus and the Reign of God* (Minneapolis: Fortress Press, 1993), hlm. 39.

sebagai suatu wilayah atau teritori, melainkan sebagai kuasa atau pemerintahan Allah yang dinyatakan dalam kedayaan KaryaNya. Penilaian Song bahwa pemahaman sebagian besar orang Kristen menghubungkan kerajaan Allah itu, dengan keselamatan Allah berupa suatu alam sorgawi, yang penuh dengan kesukaan dan kebahagiaan, yang hanya akan diberikan Allah kepada umat Kristiani, sebagai sebuah pemahaman yang keliru,³⁸ nampaknya adalah juga tepat. Hal itu dikatakan demikian, karena Yesus sendiri sebagaimana dikisahkan oleh Injil Matius 11:5 dan Injil Lukas 7:22m,³⁹ tidak memandang kerajaan Allah itu sebagai suatu ilusi yang mereduksi atau membius realitas dunia pada jamanNya, melainkan sebagai suasana pemerintahan Allah, yang Yesus sendiri harus wujudkan dengan melakukan perbuatan-perbuatan yang mendatangkan damai sejahtera bagi manusia yang menderita.

Kemudian tanggapan Song yang mengatakan bahwa pengidentikkan kekristenan dengan kerajaan Allah di dunia ini, sebagai sebuah kekeliruan, adalah juga sangat tepat.⁴⁰ Hal itu dinilai demikian, karena makna pada anak kalimat "suatu bangsa yang akan menghasilkan buah kerajaan itu" yang terkandung pada kalimat Yesus dalam kisah perumpamaan tentang penggarap-penggarap kebun anggur, " bahwa kerajaan Allah akan diambil dari pada Israel dan akan diberikan kepada suatu bangsa yang akan menghasilkan buah kerajaan itu,"⁴¹ adalah bukan dimaksudkan kepada gereja dalam pengertiannya yang tertutup,⁴² yakni umat Kristen yang diadministrasi menjadi warga jemaat karena telah diinisiasi atau diprosetisasi melalui sakramen baptisan, melainkan gereja dalam pengertian terbuka, yakni orang-orang yang menjelmakan nilai-nilai kerajaan Allah.⁴³

³⁸ Choan Seng Song, *Jesus and the Reign*....., hlm. 39.

³⁹ Matius 11:5, dan Lukas 7: 22 "orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang kusta menjadi tahir, orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan dan kepada orang miskin diberitakan khabar baik".

⁴⁰ Choan Seng Song, *Jesus and the Reign*....., hlm.39.

⁴¹ Matius 21:43, Markus 12:9, Lukas 20:16.

⁴² Hakikat gereja tidak harus dimengerti dalam arti tertutup, tetapi sebaliknya harus dipahami dalam arti terbuka. Artinya kapan saja dan dimana saja saja dapat terjadi masuknya orang yang semula dikategorikan sebagai bukan gereja menjadi gereja, sebagai akibat dari jawab mereka mengiyakan dan memberitakan karya penyelamatan Allah atau nilai-nilai kerajaan Allah sebagaimana telah didemonstrasikan oleh Yesus. Sebaliknya kapan saja dan di mana saja dapat terjadi keluarnya orang-orang yang semula dikategorikan sebagai gereja, menjadi bukan gereja karena mereka tidak menghayati dan menjelmakan nilai-nilai kerajaan Allah dalam kehidupan mereka

⁴³ Guido Tisera, "Faham Gereja Menurut Injil Matius" dalam *Orientasi Baru Pustaka Filsafat dan Teologi No.2* (Yogyakarta: Kanisius, 1988), hlm. 96.

Pengidentifikasian gereja sebagai mereka yang menghayati nilai-nilai kerajaan Allah, sangat konstruktif, karena olehnya, kekristenan akan lebih memahami bahwa setiap sesamanya manusia dari komunitas agama manapun dia berasal, bukan sebagai kaum yang tidak diselamatkan yang harus berhadapan dengan gereja sebagai kaum yang diselamatkan, melainkan sebagai sesama manusia yang sama-sama dimungkinkan untuk menjelmakan kerajaan Allah.

Terhadap fakta bahwa setiap agama dimungkinkan untuk menghayati nilai-nilai kerajaan Allah dan terkait dengan pemahamannya tentang kisah perjumpaan Yesus dengan perempuan Siro-Fenesia seperti yang dituturkan oleh Markus 7:24-30, Emanuel Gerrit Singgih mengajak gereja melihat bahwa orang beragama lain bukanlah orang yang tidak beriman.⁴⁴ Masih bersentuhan dengan fakta bahwa masing-masing agama dimungkinkan untuk menjelmakan nilai-nilai kerajaan Allah, Andreas A. Yewangoe berpandangan bahwa semua agama adalah pemberian Allah kepada manusia. Sebagai pemberian Allah, tulis Yewangoe, pada masing-masing agama ada unsur kebenaran. Oleh karena dalam semua agama ada unsur kebenaran, Yewangoe mengajak kekristenan tidak memandang orang dari agama lain sebagai orang asing apalagi musuh, melainkan sebagai tetangga dan mitra dalam perjalanan kehidupan bersama. Melanjutkan ajakannya ini, Yewangoe merekomendir agar gereja mengganti teologi permusuhannya dengan teologi keramahan dalam perjalanan kehidupan mereka bersama dengan semua umat beragama lain.⁴⁵ Berangkat dari pemahaman Song yang didukung oleh pendiran Singgih dan Yewangoe bahwa semua agama dimungkinkan untuk menjadi penghayat kerajaan Allah, maka dapat disimpulkan bahwa, esensi misi gereja adalah meneruskan keputusan Yesus yakni untuk mewujudkan kerajaan Allah di bumi, yakni bumi yang bersukacita dalam damai sejahtera, dengan jalan menjelmakan nilai-nilai kerajaan Allah itu, bersama dengan semua sesama manusia dari kelompok dan komunitas agama manapun mereka berasal.

Berdasarkan pada hakikat misi gereja seperti termaksud di atas, Emanuel Gerrit Singgih berpendirian bahwa misi gereja tidak bisa lagi dilakukan menurut cara-cara

⁴⁴ Ebenhaizer I. Nuban Timo, *Gereja Lintas Agama, Pemikiran-Pemikiran Bagi Pembaharuan Kekristenan di Asia* (Salatiga: Satya Wacana University Press, 2013), hlm. 106-107.

⁴⁵ Ibid., hlm. 44-46. Lihat juga, Andreas A. Yewangoe, *Agama dan Kerukunan* (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2006), hlm.76,84. Bandingkan juga, Andreas A. Yewangoe, *Tidak Ada Penumpang Gelap* (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2009), hlm. 53.

yang pernah berlangsung yaitu sebagai gerakan membangun gereja sebagai sebuah institusi, atau sebagai gerakan membangun simbol-simbol kesuksesan agama Kristen di suatu wilayah tertentu. Sebaliknya, dalam benak Singgih, misi gereja harus dipahami sebagai kegiatan untuk menunjukkan bahwa di suatu wilayah tertentu kerajaan Allah telah hadir. Dalam rangka memaparkan pendirian dan pandangannya seperti tersebut di atas, Singgih melakukan reinterpretasi terhadap Matius 28:18-20 yang sangat mentransformasi pemahaman misi gereja. Hal itu dikatakan demikian, karena ketika melakukan upaya reinterpretasi terhadap Matius 28:18-20, Singgih melakukan dan mengemukakan hal hal sebagai berikut :

Pertama, Singgih menemukan bahwa dalam Injil ada dua teks tentang pengutusan, yaitu Matius 10:1-42 dan Matius 28:18-20. Dalam observasinya terhadap kedua teks ini, Singgih menemukan bahwa ada perbedaan jenis pengutusan. Pada teks pengutusan dalam Matius 10:1-42, pengutusan bersifat kedalam umat Israel, sedangkan pada teks pengutusan dalam Matius 28:18-20, pengutusan bersifat keluar umat Israel. Bertolak dari hasil penemuannya ini, Singgih mengajak gereja untuk memposisikan Matius 28:18-20, memang sebagai teks pengutusan tetapi bukan sebagai isi atau pokok dari amanat atau pengutusan agung Yesus terhadap para muridNya.⁴⁶ Seruan Singgih ini memelekkkan mata gereja untuk tidak memposisikan Matius 28:18-20 sebagai satu-satunya teks Alkitab yang harus mendesain misi gereja.

Kedua, bahwa reinterpretasi Singgih terhadap Matius 28:18-20, sangat membawa pencerahan bagi gereja dalam memahami misi, adalah ketika Singgih sesuai mengajak gereja untuk memposisikan Matius 28:18-20 bukan sebagai satu-satunya teks pengutusan, ternyata Singgih juga berpendapat bahwa sesungguhnya para murid tidak mengartikan "pengutusan keluar umat Israel untuk menjadikan semua bangsa murid Yesus dan membaptis mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus", sebagai tugas pokok dalam misi yang Yesus percayakan kepadanya untuk diteruskan. Singgih membuktikan pendapatnya ini, dengan menyuguhkan fakta bahwa para murid Yesus tidak melaksanakan amanat itu. Mereka semua berkumpul di Yerusalem sampai akhir hidup mereka. Kalaupun ada informasi bahwa Petrus mati di Roma, Yohanes melewati masa hidupnya setelah kenaikan Yesus ke sorga

⁴⁶ Ebenhaizer I Nuban Timo, *Gereja Lintas Agama.....*, hlm. 92-100. Bandingkan juga, Emanuel Gerrit Singgih, *Menguak Isolasi, Menjalini Relasi* (Jakarta: Bpk Gunung Mulia, 2009), hlm. 241-245. Lihat juga, Emanuel Gerrit Singgih, *Mengantisipasi Masa Depan* (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2004), hlm. 79.

di Efesus, Thomas menjadi pekabar Injil di India dan Markus di Mesir, semua itu, tulis Singgih, hanyalah tradisi yang tidak dapat dibuktikan secara historis, dan senyatanya sumber-sumber biblis tidak menyebutkan itu. Lebih jauh Singgih mengemukakan bahwa yang pergi keluar Israel, justru adalah Paulus. Namun Paulus memahami pengutusannya itu tidak untuk membaptis. Bagi Paulus, membaptis bukan hal yang utama. Oleh karena membaptis, nampaknya memang bukan hal yang utama bagi Paulus, maka Paulus pun hanya membaptis dua orang saja yakni Krispus dan Gayus. Kemudian, dengan bertolak dari makna kata “*ekletos*” dalam Matius 22:14 dan 24:22,24,31, Singgih juga memahami bahwa pembaptisan itu adalah tanda bahwa seseorang telah ambil bagian atau berada dalam lingkungan keselamatan ilahi di dalam Yesus, untuk melakukan semua amanat agung Yesus, bukan sebagai tanda seseorang menjadi warga agama Kristen.⁴⁷ Pendapat Singgih bahwa para rasul sebenarnya tidak menterjemahkan pengutusan Yesus untuk menjadikan semua bangsa murid Yesus, sebagai amanat pokok, dan juga pemahaman Singgih tentang makna pembaptisan bukan sebagai tanda seseorang masuk agama Kristen, juga sangat membuka wawasan gereja untuk memahami misinya bukan sebagai upaya untuk penanaman dan pertumbuhan gereja.

Ketiga, bahwa reinterpretasi Singgih terhadap Matius 28:18-20 sangat membawa pencerahan bagi gereja dalam memahami misi, adalah juga ketika Singgih berpendapat bahwa pembaptisan itu adalah tanda bahwa seseorang telah ambil bagian atau berada dalam lingkungan keselamatan ilahi dalam Yesus untuk melakukan isi pokok dari amanat agung Yesus. Pendapat Singgih ini, nampaknya didasarkan pada anak kalimat: “dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah Kuperintahkan kepadamu.” Melanjutkan pemahamannya ini, Singgih mengemukakan bahwa isi amanat agung Yesus tertera dalam: Khotbah di Bukit (Matius 5-7), Kaidah Kencana (Matius 7:12), Ringkasan Taurat (Matius 22:37-40), dan pelayanan terhadap orang kecil (Matius 25:31-46). Dengan mendasarkannya pada maksud dari teks-teks tempat terteranya isi amanat agung Yesus, Singgih menyimpulkan bahwa yang menjadi isi dari amanat agung Yesus adalah panggilan untuk hidup terbuka kepada sesama yang berbeda dengan kita dan kepada Allah.⁴⁸ Pemahaman Singgih bahwa pembaptisan itu adalah tanda seseorang

⁴⁷ Ebenhaizer I Nuban Timo, *Gereja Lintas Agama*.....hlm. 92-100.

⁴⁸ Ebenhaizer I Nuban Timo, *Gereja Lintas Agama*.....hlm. 92-100.

berada dalam keselamatan Yesus yang menampakkan sikap hidup yang terbuka kepada sesama dan kepada Allah, sangat menuntun gereja untuk memahami bahwa misi gereja senyatanya adalah memang untuk menghadirkan nilai-nilai yang Yesus ajarkan dan bawa dalam misinya menghadirkan Kerajaan Allah di bumi, yaitu ketuhanan, kemanusiaan, keadilan, kesetaraan, pembebasan dan solidaritas.

Investigasi yang telah kita lakukan tentang hakikat misi gereja dalam Injil dari perspektif keindonesiaan, memperlihatkan bahwa hakikat misi gereja dan hakikat keindonesiaan senyatanya tidak berseberangan. Baik misi gereja sebagaimana dimaksudkan oleh Injil maupun misi keindonesiaan sebagaimana dikandung oleh Pancasila, sama-sama berjuang menuju masyarakat dunia (Indonesia) yang damai sejahtera, dengan jalan membangun peradaban yang dijiwai oleh nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, kebebasan, kesatuan, kesetaraan, dan solidaritas.⁴⁹ Penemuan ini, terasa mendapat afirmasi ketika Titaley juga berpendapat bahwa Pancasila dan UUD'45 itu sangat injili, karena nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila dan UUD'45 selaras dengan nilai-nilai Injil.⁵⁰ Pandangan yang substansinya sama juga datang dari Abdurrahman Wahid. Wahid mengemukakan bahwa Pancasila itu sangat Islami. Wahid berpendirian demikian karena menurut dia, nilai-nilai Pancasila itu tidak berseberangan dengan pokok-pokok ajaran Islam sebagaimana terkandung dalam Alquran.⁵¹

4. Rekonstruksi Misi Gereja Di Indonesia Dalam Perspektif Pancasila Sebagai Religiousitas Sipil Indonesia

Berdasarkan pada penemuan bahwa hakikat dan tujuan misi gereja itu, tidak berseberangan malah senyatanya selaras dengan nilai-nilai dan agenda keindonesiaan, maka pemahaman dan cara-cara misi gereja Barat yang pernah dilakukannya di Indonesia, tidak tepat lagi untuk kita teruskan sebagai pemahaman misi dan cara-cara misi gereja di Indonesia. Menyimak bahwa nilai-nilai Pancasila pada dirinya tidak salah, malah sangat Injili, Qurani dan Vedawi.

⁴⁹ Edmund Woga, *CSsR, Dasar-Dasar Misiologi*, Cetakan Kelima (Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 2006), hlm. 189-192, 201.

⁵⁰ Pendapat John A. Titaley ini disampaikan dalam kuliah Pancasila Dan Agama Sipil bagi mahasiswa Magister Sosiologi Agama Universitas Kristen Satya Waacana Salatiga Nopember 2013.

⁵¹ Abdurrahman Wahid, *Islamku Islam Anda Islam kita, : Agama Masyarakat Negara Demokrasi* (Jakarta: The Wahid Institute, 2006), hlm. 75-89.

Kemudian mencermati bahwa yang masih bermasalah justru adalah pemahaman dan penghayatan manusia-manusia Indonesia akan nilai-nilai keindonesiaannya yang masih ringkih, rapuh dan goyang sehingga suasana Indonesia dalam realitas sering menyimpang dari suasana Indonesia dalam idealitas;⁵² maka dalam rangka gereja meneruskan misinya yang kontekstual⁵³ di Indonesia, gereja Indonesia patut melakukan rekonstruksi misi berupa revitalisasi dan rejuvenasi religiousitas keindonesiaan. Dalam rangka merevitalisasi atau mengaktualisasikan peradaban Indonesia yang sangat injili ini, demi terwujudnya agenda Indonesia yakni Indonesia mensejahtera, gereja bersama dengan semua komponen bangsa patut melakukan program dan gerakan strategis sebagai berikut:

4.1. Program Pematapan Spiritualitas Indonesia yang Toleran Dan Humanis

Dalam rangka memantapkan Indonesia sebagai bangsa dimana penduduknya mengagungkan rasa ketuhanan, kemanusiaan dan kesetaraan, maka gereja bersama dengan semua komponen bangsa lainnya, patut membuat program pematapan spiritualitas yang toleran dan humanis. Hal ini patut digalang sebab banyak tindakan penistaan kehidupan umat manusia yang terjadi di Indonesia, dipicu justru oleh paham-paham keagamaan dan cara-cara hidup beragama yang keliru. Pendewaan masing-masing agama atas kitab sucinya, misalnya, tidak jarang menjadi sebab munculnya fanatisme buta, paham ekstrem dan sikap radikal dikalangan umat beragama. Sikap penyembahan masing-masing agama terhadap dogmanya, juga banyak kali melahirkan sikap fanatik, arogan dan intoleran satu kelompok agama terhadap kelompok agama lainnya. Kemudian, perbedaan agama yang ada sering menjadi sumber konflik dan kerusuhan, karena masing-masing agama saling bersaing dan bertanding keunggulan lalu akhirnya tertutup, curiga dan berupaya untuk saling mentiadakan. Beberapa hal yang gereja bersama dengan semua agama dapat lakukan sebagai program pematapan spiritualitas Indonesia yang humanis adalah seperti: *Pertama*, melakukan pendampingan dan pendidikan untuk pembebasan umat beragama dari dogmatolarisme dan bibliotarisme. *Kedua*, menyelenggarakan pembinaan

⁵² Ahmad Syafii Maarif, *Islam Dalam Bingkai.....*, hlm. 23.

⁵³ Dengan mengikuti pandangan Emanuel Gerrit Singgih, Martin Lukito Sinaga, dan Ebenhaizer I. Nuban Timo, saya memahami misi yang kontekstual adalah misi yang mengakomodasi realitas sosial sebagai jalan untuk melakukan transformasi sosial. Lihat Ebenhaizer I. Nuban Timo, *Allah Menahan Diri, Tetapi Pantang Berdiam Diri, Suatu Upaya Berdogmatika Kontekstual di Indonesia* (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2015), hlm. xv-xvi,

dan pembentukan umat beragama yang saling terbuka dan berdialog. *Ketiga*, melaksanakan kerja sama lintas agama yang berguna bagi masyarakat luas.

Dalam program pendampingan dan pendidikan untuk pembebasan umat beragama dari dogmatolarisme, kita patut membantu umat agar memahami dan memposisikan dogma agama bukan sebagai sesuatu yang baku, apalagi sebagai sesuatu yang bersifat ilahi. Hal itu patut dilakukan karena dogma agama, sebagaimana juga dipandang oleh Raymondo Panikkar, hanyalah instrument lewat mana kita menjelaskan apa yang kita imani. Oleh karena itu kita tidak salah bila kita selalu mereformasinya untuk menghadapi situasi baru⁵⁴ dan demi transformasi sosial yang mengagungkan kemanusiaan. Sebaliknya kita justru tetap akan melakukan kesalahan demi kesalahan sampai menistakan kehidupan dan kemanusiaan, bila kita memandang doktrin agama sebagai sebuah kebenaran yang bersifat absolute. Dalam pendampingan dan pendidikan untuk pembebasan umat beragama dari bibliotarisme, kita patut membantu umat agar memahami dan memposisikan kitab suci agama-agama adalah produk manusia dalam rentang dan dinamika sejarah, sosial, budaya, politik, serta religinya. Hal itu patut dilakukan karena, kitab suci agama-agama, sebagaimana juga dipandang Titaley, senyatanya adalah kitab-kitab keagamaan yang terbentuknya sangat dipengaruhi oleh dinamika sosial, politik, dan ekonomi masyarakat darimana kitab suci itu berasal. Dalam keadaan yang demikian, tambah Titaley, bukannya tidak mungkin pula terjadi, bahwa pada suatu saat tertentu pengaruh dari faktor sosial budaya itu sedemikian kuatnya, sehingga keinginan manusia itu dirumuskan dengan bahasa ilahi di dalam teks kitab suci itu.⁵⁵

Pemberdayaan umat untuk memandang kitab suci agama-agama sebagai produk manusia, akan membantu umat membaca dan memaknai kitab suci dari kacamata dan dinamika sosio-historik zaman kemunculan dan peredaksian kitab suci, sehingga umat terhindar dari fanatisme buta yang acapkali merupakan spiritualitas dishumanis. Dampak dari program pembebasan umat dari sikap dogmatolatry dan bibliotalatry yang demikian ini, diharap akan

⁵⁴ Ebenhaizer I. Nuban Timo, *Gereja Lintas Agama, Pemikiran-Pemikiran Bagi Pembaharuan Kekristenan di Asia* (Salatiga: Satya Wacana University Press, 2013), hlm. 281-282. Lihat juga, Raymondo Panikkar, *The Unknown Christ of Hinduism, Completely Revised and Enlarge Edition* (New York: Orbis Book, 1981), hlm. 52-55.

⁵⁵ John A. Titaley, *Religiusitas di Alinea Tiga: Pluralisme, Nasionalisme dan Transformasi Agama-Agama* (Salatiga: Satya Wacana University Press, 2013), hlm. 1,19.

menumbuhkembangkan spiritualitas masyarakat Indonesia yang menghormati Allah berupa sikap membiarkan Allah menjadi Allah,⁵⁶ dan sekaligus menghormati semua manusia yang beragama lain dengan berpandangan bahwa, *"people take different roads seeking fulfillment and happiness. Just because they are not on your road does not mean they are lost"*.⁵⁷

Terhadap manusia Indonesia yang telah berangsur-angsur membuang sikap dogmatality dan bibliotalatrynya, program pembentukan umat beragama yang saling terbuka dan berdialog, tidak hanya sangat kondusif untuk dilakukan, tetapi program itu juga diperkirakan akan sangat mempengaruhi mantapnya perkembangan spiritualitas Indonesia yang humanis. Bahwa dialog dikatakan sebagai program yang kondusif, karena dalam dialog masing-masing agama telah berani melakukan langkah praksis untuk menyeberang atau melintas batas, dengan membawa identitas dinamis, yang disadarinya bisa berubah, dalam interaksi dan negosiasi yang terjadi⁵⁸. Bahwa program dialog diduga akan sangat menumbuh kembangkan spiritualitas Indonesia yang humanis, adalah karena dengan saling mendialogkan dirinya dan keyakinannya, masing-masing agama akan semakin meyakini bahwa mereka semua adalah manusia kepunyaan Tuhan, yang sama-sama memiliki kebenaran agama yang berbilang sifatnya, tetapi juga bersamaan dengan itu sama-sama mempunyai keterbatasan dalam memahami Tuhan. Konsekuensi logis dari kesadaran yang demikian ini, dapat diraba akan menuntun umat beragama Indonesia untuk bisa saling merendahkan diri atas keterbatasan pemahaman mereka, dan seraya dengan itu saling menghormati karena mereka bisa saling belajar satu sama lain, dari kelebihan mereka masing-masing. Cara beragama yang menghormati Tuhan dalam bentuk perbuatan hormat kepada sesama, akan sangat membantu kita untuk memelihara bahkan menggelorakan spiritualitas Indonesia yang humanis.

⁵⁶ M. Thomas Thangaraj, "Let God Be God: Crossing Boundaries as a Theological Practice." dalam D.N. Premnath (ed.), *Border Crossing: Cross-Cultural Hermeneutics* (New York: Orbis Books), hlm.100.

⁵⁷ "People take different roads seeking fulfillment and happiness, Just because they are not on your road does not mean they are lost". Ini adalah pandangan Dalai Lama terhadap eksistensi masing-masing agama. Dikutip oleh Sumanto Al Qurtuby. Lihat Sumanto Al Qurtuby, "John Titaly di Mataku" dalam Steve Gaspersz, Tedi Kholiludin (eds.), *Nyantri Bersama John Titaly* (Salatiga: Satya Wacana University Press, 2014), hlm. 85.

⁵⁸ Pui-Lan, dalam D.N. Premnath (ed.), *Border Crossing: Cross-Cultural Hermeneutics* (New York: Orbis Books), hlm. 104.

Dalam rangka pemantapan spiritualitas Indonesia yang humanis, tidak manipulatif dan tidak bernilai nol dihadapan Tuhan, program kerja sama lintas agama untuk kemanusiaan sangat strategis untuk dilakukan oleh gereja bersama dengan semua agama. Dengan melaksanakan program tersebut, gereja bersama dengan semua agama melakukan edukasi yang menuntun penduduk Indonesia menjadi insane yang semakin memiliki kepekaan terhadap masalah kemanusiaan, semakin ramah terhadap perbedaan, semakin tergerak menjadi pengayom keanekaragaman dan semakin bergairah untuk menjadi manusia Indonesia yang bermanfaat bagi orang banyak. Terbentuknya insane Indonesia yang demikian, sebagai hasil dari edukasi program kerja sama lintas agama untuk kemanusiaan, akan semakin membuat masyarakat Indonesia menyadari bahwa yang paling penting dalam beragama adalah bagaimana masing-masing agama itu menjalani hidup yang berguna bagi kemanusiaan. Konsekuensi logis dari kesadaran ini pula , akan menghidupi pandangan masyarakat Indonesia bahwa seseorang memiliki agama yang berbeda dengan dirinya tidak menjadi masalah bahkan hal itu diyakini sebagai sesuatu yang wajar terjadi, sebab latar belakang dan pengalaman sejarah yang membentuk keagamaan seseorang pada berlainan. Sikap beragama yang tidak menempatkan agama sebagai tujuan melainkan sebagai sarana untuk meujudkan kebajikan bagi kemanusiaan, akan sangat membantu Indonesia dalam merevitalisasi spiritualitasnya yang humanis.

4.2. Program Pemantapan Nasionalitas Indonesia Yang Multikulturalis

Dalam rangka mengaktualisasikan dan sekaligus menyaksikan kepada dunia bahwa Indonesia adalah bangsa yang sangat menjunjung tinggi nilai-nilai kebebasan, kesetaraan dan persatuan, maka gereja bersama dengan semua agama dan pemerintah Indonesia, patut merancang program pemantapan nasionalitas yang multikulturalistis dan demokratis. Program ini dipandang perlu untuk dibuat, sebab fakta menunjukkan bahwa dalam perjalanan mengindonesia, sering anak bangsa tidak konsisten lagi dalam merawat keindonesiaannya yang plural tapi sakral, dan dalam menghargai setiap komponen bangsa sebagai bagian integral dari Indonesia. Permintaan untuk mendapat hak dan perlakuan khusus, dari satu komponen bangsa misalnya, karena ia merasa sebagai kelompok mayoritas, merupakan tindakan yang sangat mencabik nasionalitas kita yang multikultural. Ketidakhadiran Negara atau kegamangan pemerintah atau ketidakmampuan pemerintah mengatasi tindakan-tindakan diskriminatif

sekelompok masyarakat yang menindas sesama orang Indonesia, adalah juga contoh tindakan yang sangat mengoyak-ngoyak nasionalitas kita yang menghargai kesatuan dan kepelbargian. Demikian pula, pemunculan ide dan gerakan separatis dikalangan sekelompok anak bangsa, yang dipicu oleh adanya perasaan merugi menjadi bagian integral Indonesia, senyatanya merupakan contoh dari perbuatan yang sangat menciderai perjalanan kita dalam menjaga nasionalitas Indonesia yang satu dalam keragamannya dan beragam dalam kesatuannya. Beberapa hal yang gereja bersama dengan semua agama dan pemerintah dapat lakukan sebagai program pemantapan nasionalitas yang multicultural adalah seperti : *Pertama*, melakukan edukasi dan sosialisasi bahwa Indonesia adalah karya penyelamatan Tuhan. *Kedua*, menyelenggarakan edukasi dan sosialisasi bahwa Indonesia adalah semua untuk semua, dan Indonesia adalah semua untuk Indonesia. *Ketiga*, melaksanakan edukasi dan sosialisasi bahwa Indonesia adalah negara yang beragama tetapi bukan sebuah Negara agama.

Melalui edukasi dan sosialisasi tentang nasionalitas Indonesia sebagai karya penyelamatan Tuhan bagi Indonesia, kita mengingatkan seluruh rakyat akan pengakuan para pendiri bangsa, bahwa pembentuk nasionalitas Indonesia yang multikultural dan demokratis, diyakini bahwa itu terjadi bukan terutama karena kehebatan para pendiri bangsa, tetapi justru karena pertama dan utama adanya campur tangan Tuhan Yang Maha Kuasa. Bahwa nasionalitas Indonesia yang demokratis adalah karya penyelamatan Tuhan, nampak jelas ketika Tuhan menurunkan roh kesetaraan itu dalam keindonesiaan. Dalam nasionalitas Indonesia yang berjiwa kesetaraan, demokrasi Indonesia dibangun bukan berdasarkan pada asas mayoritas tetapi pada musyawarah untuk mufakat. Sebagai karya penyelamatan Tuhan, nasionalitas Indonesia yang demokratis karena roh kesetaraan itu memang sangat sakral. Ia menyelamatkan seluruh rakyat Indonesia yang sangat majemuk untuk bisa hidup sebagai bangsa yang satu dalam keragaman dan beragam dalam kesatuan.⁵⁹ Edukasi dan sosialisasi tentang nasionalitas Indonesia demokratis sebagai karya penyelamatan Tuhan, nampaknya akan mampu membangkitkan kegairahan rakyat untuk menghargai, mencintai dan memaknai keindonesiaan sebagai wadah dan modal nasional dimana setiap

⁵⁹ John A. Titaley, "Pembangunan dan Pengembangan Umat Kristen di Indonesia: Suatu Refleksi Kontekstual," Paper disampaikan dalam seminar Ramadhan di Kampus Universitas Islam Sultan Agung di Semarang (tanggal 3 Pebruari 1996), hlm. 3-4.

komponen bangsa bisa mengembangkan dirinya masing-masing dengan kekuatan Indonesia, dan sekaligus juga sebagai bangsa. Dampak dari penyelenggaraan edukasi dan sosialisasi tentang nasionalitas Indonesia yang multikultural, plural dan demokratis seperti ini, nampaknya juga akan menuntun seluruh masyarakat Indonesia untuk semakin menyadari dan memaknai Indonesia sebagai rumah bersama mereka, untuk mereka pelihara bersama, karena hanya bila rumah bersama mereka masih kokoh berdiri, mereka juga sebagai komponen bangsa masih dimungkinkan bisa tinggal nyaman di dalam rumah itu.

Terhadap masyarakat yang telah menyadari bahwa Indonesia adalah rumah bersama mereka, edukasi dan sosialisasi bahwa Indonesia adalah semua untuk semua dan Indonesia adalah semua untuk Indonesia, nampaknya sangat tepat untuk dilakukan, demi bertumbuhkembangnya secara mantap penghayatan masyarakat akan nasionalitas Indonesia yang multikultural dan demokratis. Penyelenggaraan edukasi dan sosialisasi termaksud, akan membantu setiap manusia Indonesia untuk memandang manusia Indonesia lainnya sebagai sesama manusia yang setara, sebagai manusia yang sama-sama memiliki kemerdekaan politik, sebagai manusia dengan kesamaan kemanusiaan yang utuh, sebagai manusia yang mempunyai hak dan kewajiban yang sama tanpa perbedaan, di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Penyelenggaraan edukasi dan sosialisasi bahwa Indonesia adalah semua untuk semua, juga akan membantu anak bangsa untuk menyadari bahwa mengingkari hak kemerdekaan seorang anak Indonesia berarti mengingkari nasionalitas Indonesia yang demokratis. Kesadaran anak bangsa untuk memandang dan memperlakukan manusia Indonesia lainnya, sebagai manusia Indonesia yang setara, akan sangat membantu Indonesia untuk merevitalisasi nasionalitasnya yang multikultural dan demokratis.

Terhadap bangsa yang telah menginsafi bahwa setiap anak Indonesia adalah manusia yang setara dengan manusia Indonesia lainnya, penyelenggaraan edukasi dan sosialisasi tentang Indonesia sebagai Negara beragama tetapi bukan sebagai Negara agama, nampaknya sangat kondusif untuk dilakukan, demi semakin bertumbuhkembangnya pengamalan masyarakat akan nasionalitas Indonesia yang demokratis. Hal itu diperkirakan demikian, karena melalui edukasi dan sosialisasi termaksud, seluruh komponen bangsa diingatkan bahwa Indonesia bukanlah Negara sekuler yang terpisah dari agama, tetapi juga bukan Negara

beragama yang menyatu dengan agama.⁶⁰ Peringatan bahwa agama tidak terpisah dari Negara, setidaknya akan menuntun setiap komponen bangsa khususnya Negara untuk menyadari bahwa mereka mempunyai panggilan untuk membimbing, memelihara dan mengembangkan setiap agama secara aktif dan dinamis. Peringatan bahwa agama tidak menyatu dengan Negara, akan menuntun setiap komponen bangsa khususnya Negara untuk menyadari bahwa posisi Negara tidak mewakili agama tertentu, sehingga mereka tidak boleh didikte oleh agama tertentu, dan juga tidak boleh memberikan keistimewaan kepada salah satu agama. Dalam Indonesia Negara beragama namun bukan Negara agama, setiap warga Negara mempunyai hak dan kewajiban yang sama tanpa ada perbedaan. Setiap agama yang hidup di alam Indonesia adalah anak masyarakat Indonesia, tidak ada anak emas diantara mereka. Semuanya tanpa terkecuali adalah anak Indonesia. Dampak dari edukasi dan sosialisasi tentang Indonesia bukan Negara agama berupa kesadaran untuk tidak memperlakukan setiap anak bangsa secara berbeda karena latar belakang kesukuan, atau kebudayaan atau keagamaan, akan sangat membantu Indonesia untuk merejuvenasi nasionalitas Indonesia yang demokratis.

4.3. Program Pemantapan Sosiolitas Indonesia Yang Bersifat Kekeluargaan

Dalam mewujudkan Indonesia sebagai bangsa dimana penduduknya menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, kebersamaan dan keadilan, maka gereja bersama dengan semua agama dan pemerintah, patut merancang program pemantapan sosiolitas Indonesia yang bersifat gotong royong. Hal ini patut direncanakan, sebab kesenjangan kesejahteraan masyarakat Indonesia di bidang ekonomi, pendidikan, dan politik, yang nampaknya disebabkan oleh adanya sikap ketidaksolideran di antara anak bangsa, sangat mencolok. Kemudian kesenjangan sosial ini sering memicu terjadinya tindakan-tindakan kekerasan dalam masyarakat. Beberapa hal yang gereja bersama dengan semua komponen bangsa dapat lakukan sebagai program pemantapan sosiolitas Indonesia yang egaliter adalah seperti: *Pertama*, bekerjasama dengan semua komponen bangsa mengupayakan adanya lembaga pemberian bantuan karitatif nasional bagi anak bangsa yang memerlukan. *Kedua*, bekerjasama dengan semua komponen bangsa mengkarakterisasi lembaga-lembaga pelayanan sebagai lembaga yang

⁶⁰A. Sunarko, "Agama di Ruang Publik Demokrasi Indonesia, dalam *Basis*, (Jakarta: No. 03-04, Tahun ke 62, 2013), hlm.11.

memberdayakan masyarakat lemah. *Ketiga*, bekerjasama dengan semua komponen bangsa untuk mengupayakan pembangunan nasional yang berkiat pada kesejahteraan bersama.

Kerja sama semua komponen bangsa dalam mengupayakan adanya lembaga pemberian bantuan karitatif nasional bagi anak bangsa yang memerlukan, sangat perlu untuk dilakukan. Lembaga atas nama kemanusiaan Indonesia ini, akan bisa menyalurkan bantuan kemanusiaan secara manusiawi kepada anak bangsa yang tengah menderita karena tertindas, kelaparan, bencana dan gelandangan. Bantuan yang demikian pada umumnya sangat menyembuhkan anak bangsa yang dibantu, dan sekaligus juga sangat meningkatkan kepedulian anak bangsa yang membantu. Pelayanan pemberian bantuan kemanusiaan yang demikian ini, sangat memupuk subur bertumbuh kembangnya sosialitas Indonesia yang egaliter. Mereka yang membantu tidak menolong dengan maksud untuk mengeksploitasi sesamanya. Dan mereka yang mendapat bantuan tidak merasa terbeli harkat kemanusiaannya.

Kerja sama semua komponen bangsa dalam mengkarakterisasi lembaga-lembaga pelayanan sebagai lembaga yang memberdayakan masyarakat lemah, sangat mutlak untuk dilakukan. Hal itu patut dilakukan, karena sampai sat ini lembaga pemberdayaan nasional di bidang pendidikan, ekonomi, politik sering hanya berpihak kepada masyarakat yang sudah mampu dan mengabaikan masyarakat yang lemah. Kebijakan yang demikian ini membuat masyarakat yang mampu bertambah mampu, dan masyarakat yang lemah semakin tidak berdaya. Menyelenggarakan lembaga-lembaga pelayanan yang berorientasi pada pemberdayaan masyarakat lemah, akan memungkinkan terciptanya kesempatan dan fasilitas yang sama bagi semua golongan masyarakat untuk sama-sama berkembang. Kepedulian semua komponen bangsa untuk membantu pemberdayaan mereka yang lemah, sementara masyarakat yang kuat bisa melakukan pemberdayaan diri dengan kekuatannya, akan melahirkan tatanan sosialitas nasional yang bersifat kekeluargaan dan egaliter.

Bersama dengan semua komponen bangsa membantu pemerintah untuk menyelenggarakan pembangunan nasional yang berorientasi ke seluruh wilayah Indonesia, tidak dengan roh kapitalisme tetapi dengan roh sosialisme gotong royong. Pembangunan nasional yang berjiwa sosialisme gotong royong, adalah

membangun tanah air Indonesia, dengan jalan memelihara dan memanfaatkan sumber daya alam sedemikian rupa agar seluruh manusia Indonesia dapat memperoleh keadilan, kesembuhan dan keutuhan hidup.

Daftar Pustaka

- Aritonang, Jan, dan Christian de Jonge. *Apa dan Bagaimana Gereja? Pengantar Sejarah Ekklesiologi*, Cetakan Kedua. Jakarta: BPK Gunung Mulia, 1993.
- Bahar, Saafroedin, dkk. *Risalah Sidang Badan Penyelidik Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) dan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI)*. Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia, 1995.
- Bellah, Robert. *Beyond Belief*, diindonesiakan oleh Rudy Harisyah Alam. Jakarta: Paramadina, 2000.
- Bosch, D.J. *Transforming Mission, Paradigm Shifts in Theology of Mission*. Maryknoll New York: Orbis Books, 1991.
- Bustanuddin, Agus. *Agama dan Fenomena Sosial, Buku Ajar Sosiologi Agama*. Jakarta: Universitas Indonesia, 2010.
- Campbell, Tom. *Tujuh Teori Sosial: Sketsa, Penilaian, Perbandingan*. Yogyakarta: Kanisius, 1994.
- Cooley, dan F.Ukur. *Jerih dan Juang, Laporan Nasional Survey Menyeluruh Gereja di Indonesia*. Jakarta: Lembaga Penelitian dan Studi DGI, 1979.
- Durkheim, Emile. *The Division of Labor in Society*. New York: The Free Press, 1984.
- _____. *The Elementary Forms of the Religious Life*, Carol Cosman (trans.). Oxford: University Press, 2001.
- Effendi, Djohan. *Pluralisme Dan Kebebasan Beragama*, Cetakan IV. Yogyakarta: Institut Dian/Interfidei, 2013.
- Hammond, Philip E. & Robert N. Bellah. *Varietas of Civil Religion*, diindonesiakan oleh Imam Khoiri, Fathurrahman, Sirojuddin Arif, Jazilus Saho'M. Yogyakarta: IRCiSoD, 2003.
- Hartono, Chris. *Pietisme di Eropa dan Pengaruhnya di Indonesia*. Jakarta: BPK Gunung Mulia, 1974.
- Johnson, Doyle P. *Sociological Theory: Classical Founders and Contemporary Perspective*, diindonesiakan oleh Robert M.Z. Lawang, Teori Sosiologi Klasik dan Modern. Jakarta: PT Gramedia, 1986.
- Kaelan, *Pancasila Yuridis Kenegaraan*. Yogyakarta: Liberty, 1987.
- Kane, J. Herbert. *Understanding Christian Missions*, Fourth Edition. Grand Rapids: Baker Book House, 1990.
- Kuschel, Karl-Josef dan Hans Kung. *A Global Ethic*, diindonesiakan oleh Ahmad Murtajib. Yogyakarta: Sisiphus, 1999.

- Lan, Pui. *Border Crossing: Cross-Cultural Hermeneutics* dalam D.N. Premnath (ed.). New York: Orbis Books.
- Latif, Yudi. *Negara Paripurna, Historisitas, Rasionalitas, dan Aktualitas Pancasila*, Cetakan Keempat. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2012.
- Maarif, Ahmad Syafii. *Islam Dalam Bingkai Keindonesiaan Dan Kemanusiaan Sebuah Refleksi Sejarah*. Bandung: Penerbit Mizan, 2009.
- Messakh, Thobias A. *Konsep Keadilan Dalam Pancasila*. Salatiga: Satya Wacana University Press, 2007.
- Muhni, Djuretna A. Imam. *Moral Religi Menurut Emile Durkheim & Henri Bergson*. Yogyakarta: Kanisius, 1994.
- Panikkar, Raymondo. *The Unknown Christ of Hinduism, Completely Revised and Enlarge Edition*. New York: Orbis Book, 1981.
- Pas, Daniel I. *Eight Theories of Religion, Second Edition*. New York: Oxford University Press, 2006.
- Pegawai, Tim Pusdiklat. *Undang Undang Dasar 1945*. Jakarta: Pusdiklat Pegawai, 2008.
- Phan, Peter C. *In Our Own Tongues, Perspective from Asia on Mission and Inculturation*. Maryknoll, New York: ORBIS BOOKS, 2003.
- Pieris, Aloysius. *Toward an Asian Theology of Liberation: Some Religion-Culture Guidelines,"Dialogue, New Series VI*. Colombo: Ecumenical Institute for Study and Dialogue, 1979.
- Qurtuby, Sumanto Al. *John Titaley di Matakuku dalam Steve Gaspersz, Tedi Kholiludin, (eds.), Nyantri Bersama John Titaley*. Salatiga: Satya Wacana University Press, 2014.
- Rousseau, Jean Jacques. *The Social Contract*, diindonesiakan oleh Sumardjo. Jakarta: Penerbit Erlangga, 1986.
- Seregig, I Ketut. *Filsafat Pancasila dalam Perspektif Hindu*. Surabaya: Penerbit PARAMITA, 2012.
- Singgih, Emanuel Gerrit. *Dari Israel ke Asia*. Jakarta: BPK Gunung Mulia, 1983.
- _____. *Mengantisipasi Masa Depan*. Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2004.
- _____. *Menguak Isolasi, Menjalin Relas*. Jakarta: Bpk Gunung Mulia, 2009.
- Soekarno, *Di Bawah Bendera Revolusi, Vol. 1*. Jakarta: Panitia Di Bawah Bendera Revolusi, 1964.

- _____. *Indonesia Menggugat*. Jakarta: Yayasan Pendidikan Sukarna-Inti Idayu Press, 1983.
- Song, Choan Seng. *Christian mission in Reconstruction an Asian Analysis*. Maryknoll, New York: ORBIS BOOKS, 1977.
- _____. *Jesus and the Reign of God*. Minneapolis: Fortress Press, 1993.
- Sunarko, A. *Agama di Ruang Publik Demokrasi Indonesia, dalam Basis*. Jakarta: No. 03-04, Tahun ke 62, 2013.
- S.Y, Dick Hartoko. *Perjumpaan Gereja Dengan Budaya*, "dalam Chris Hartono(ed.), *Perjumpaan Gereja di Indonesia Dengan Duniannya Yang Sedang Berubah*. Jakarta: Persetia, 1995.
- Tanja, Victor I. *Perjumpaan Gereja Dengan Agama-Agama Lain*. dalam Chris Hartono(ed.), *Perjumpaan Gereja di Indonesia Dengan Duniannya Yang Sedang Berubah*. Jakarta: Persetia, 1995.
- Thangaraj, M. Thomas. *Let God Be God: Crossing Boundariers as A Theological Practice*, dalam D. N. Premnath (ed.), *Border Crossing: Cross-Cultural Hermeneutics*. New York: Orbis Books.
- Timo, Ebenhaizer I. Nuban. *Gereja Lintas Agama, Pemikiran-Pemikiran Bagi Pembaharuan Kekristenan di Asia*. Salatiga: Satya Wacana University Press, 2013.
- _____. *Allah Menahan Diri, Tetapi Pantang Berdiam Diri, Suatu Upaya Berdogmatika Kontekstual di Indonesia*. Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2015.
- Tisera, Guido. *Faham Gereja Menurut Injil Matius dalam Orientasi Baru Pustaka Filsafat dan Teologi No. 2*. Yogyakarta: Kanisius, 1988.
- Titaley, John A. *Kata Sambutan*, dalam John. Campbell-Nelson(ed.), *Mengupayakan Misi Gereja Yang Kontekstual Studi Institute Misiologi Persetia 1992*. Jakarta: Persetia,1995.
- _____. *Nilai-Nilai Dasar Yang Terkandung Dalam Pembukaan Undang Undang Dasar 1945*. Salatiga: Fakultas Teologi UKSW, 1999.
- _____. *Panggilan Gereja Dalam Heterogenitas Masyarakat Indonesia, Makalah*. Salatiga: 19 Juli 1997.
- _____. *Pembangunan dan Pengembangan Umat Kristen di Indonesia, Suatu Refleksi Kontekstual*, Paper seminar disampaikan dalam *Ramadhan di Kampus Universitas Islam Sultan Agung*. Semarang: 3 Pebruari 1996.

_____. *Religiousitas di Alinea Tiga: Pluralisme, Nasionalisme dan Transformasi Agama-Agama*. Salatiga: Satya Wacana University Press, 2013.

Veeger, K.J. *Realitas Sosial: Refleksi Filsafat Sosial atas Hubungan Individu-Masyarakat dalam Cakrawala Sejarah Sosial*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 1993.

Wahid, Abdurrahman. *Islamku, Islam Anda, Islam kita: Agama Masyarakat Negara Demokrasi*. Jakarta: The Wahid Institute, 2006.

Woga, Edmund CSsR. *Dasar-Dasar Misiologi*, Cetakan Kelima. Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 2006.

Yewangoe, Andreas A. *Agama dan Kerukunan*. Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2006.

_____. *Tidak Ada Penumpang Gelap*. Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2009.